

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI



DOKUMEN RENJA 2023



Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 2 - Telanai Pura, Jambi
Telp. (0741) 668210 Fax. (0741) 667691
Website : bkd.jambiprov.go.id - email : bkd@jambiprov.go.id

Daftar isi

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD | 28 |
| 2.4. Review Rancangan Awal RKPD | 31 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 41 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 42 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 42 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah..... | 45 |
| 3.3. Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026 | 46 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 57 |
| 4.1. Rencana Kerja BKD Tahun 2023 | 58 |
| 4.2. Rencana Pendanaan BKD Tahun 2023 | 58 |
| BAB V PENUTUP | 63 |

Daftar tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Target Capaian Tahunan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 | 5 |
| Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2021 | 5 |
| Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) BKD Provinsi Jambi | 6 |
| Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | 8 |
| Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021 | 11 |
| Tabel 2.6. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022 | 17 |
| Tabel 2.7. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 | 24 |
| Tabel 2.8. Target Kinerja Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 | 24 |
| Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 31 |
| Tabel 2.10. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jambi sesuai Permendagri | 32 |
| Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKD Provinsi Jambi | 41 |
| Tabel 3.1. Rencana Program, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BKD Provinsi Jambi 2022 - 2026 | 49 |
| Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 BKD Provinsi Jambi | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat

daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kepegawaian Daerah di Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021;
 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 39);
 13. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2023 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jambi.

2. Memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan dokumen RKPD Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyajian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rencana Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Strategi dan Kebijakan
- 4.2. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 Pagu Murni sebesar Rp. 116.870.406.000 (Seratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah). Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2022 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2023 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp.20.209.620.840,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan pemetaan Permendagri 90 (Tabel Terlampir).

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah dapat dikemukakan secara umum Capaian indikator kinerja utama BKD Provinsi Jambi tahun 2021 yang menjadi IKU Gubernur Jambi, dan Capaian indikator kinerja utama BKD Provinsi Jambi tahun 2021 (IKU Eselon II), antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Capaian Tahunan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Tahunan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|--|------------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Persentase pegawai tamatan S2 dan S3 | 8% | 9% | 10% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Target | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU |
|----|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---|
| 1. | Persentase pegawai tamatan S2 dan S3 | Persen | 9% | 8.46% | Realisasi mendekati target RPJMD (9%) dengan realisasi target akhir periode RPJMD sebesar 8.46% dan capaian kinerja sebesar 94%, artinya dalam kategori sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) |

Capaian indikator kinerja utama BKD Provinsi Jambi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
BKD Provinsi Jambi

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan | Satuan | Target | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU |
|----|---|--|--------|--------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya | $\frac{\text{Jumlah ASN yang terfasilitasi untuk mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan jabatannya}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Jambi}} \times 100$ | persen | 5 | 10.64 | Realisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 212.80%, artinya dalam kategori sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) |
| 2. | Persentase penetapan ASN dalam jabatan | $\frac{\text{Jumlah ASN yang telah ditetapkan dalam jabatan}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Jambi}} \times 100$ | persen | 10 | 14.11 | Realisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 141.10%, artinya dalam kategori sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) |
| 3. | Persentase peningkatan penanganan pelanggaran disiplin | $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah pelanggaran Disiplin tahun berjalan}} \times 100$ | persen | 70 | 130.00 | Realisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 185.71%, artinya dalam kategori sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) |
| 4. | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | <i>Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | Indeks | B(85) | B(85.55) | Realisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 185.71%, artinya dalam kategori sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) |

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.4**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**

| No. | Kode Rekening | Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran Murni | Anggaran Setelah APBD-P | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi Anggaran | Target Kinerja | Realisasi Target Kinerja |
|-----|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 230,027,922.00 | 196,632,922.00 | 175,938,572.00 | 89.48 | | |
| 1 | 5.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19,481,600.00 | 19,481,600.00 | 19,481,600.00 | 100.00 | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 2 | 5.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 177,837,722.00 | 144,442,722.00 | 127,486,694.00 | 88.26 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 3 | 5.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32,708,600.00 | 32,708,600.00 | 28,970,278.00 | 88.57 | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
| | 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13,002,139,668.00 | 12,180,419,660.00 | 10,999,579,268.00 | 90.31 | | |
| 4 | 5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12,814,940,216.00 | 12,025,039,208.00 | 10,845,683,056.00 | 90.19 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 5 | 5.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 172,788,281.00 | 140,969,281.00 | 140,289,281.00 | 99.52 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 6 | 5.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 14,411,171.00 | 14,411,171.00 | 13,606,931.00 | 94.42 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 5.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18,455,656.00 | 18,455,656.00 | 18,259,000.00 | 98.93 | | |
| 7 | 5.03.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 18,455,656.00 | 18,455,656.00 | 18,259,000.00 | 98.93 | 1 Kali | 1 Kali |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 465,252,002.00 | 498,191,389.00 | 359,841,795.00 | 72.23 | | |
| 8 | 5.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8,999,130.00 | 8,999,130.00 | 8,999,130.00 | 100.00 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 9 | 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14,947,400.00 | 194,988,199.00 | 102,395,000.00 | 52.51 | 2 Jenis | 5 Jenis |
| 10 | 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,392,500.00 | 96.63 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 11 | 5.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16,377,680.00 | 16,377,680.00 | 15,577,265.00 | 95.11 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 12 | 5.03.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9,555,000.00 | 9,555,000.00 | 9,555,000.00 | 100.00 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 13 | 5.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 361,754,200.00 | 207,504,200.00 | 163,199,900.00 | 78.65 | 90 Kali | 70 Kali |
| 14 | 5.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 35,618,592.00 | 42,767,180.00 | 42,723,000.00 | 99.90 | 12 Bulan | 12 Bulan |

| No. | Kode Rekening | Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran Murni | Anggaran Setelah APBD-P | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi Anggaran | Target Kinerja | Realisasi Target Kinerja |
|-----|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 688,921,686.00 | 650,968,917.00 | 628,410,347.00 | 96.53 | | |
| 15 | 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3,529,200.00 | 3,529,200.00 | 2,409,500.00 | 68.27 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 16 | 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 475,918,910.00 | 428,904,075.00 | 407,628,393.00 | 95.04 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 17 | 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 209,473,576.00 | 218,535,642.00 | 218,372,454.00 | 99.93 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 237,205,000.00 | 237,205,000.00 | 224,020,295.00 | 94.44 | | |
| 18 | 5.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 199,900,000.00 | 199,900,000.00 | 186,860,795.00 | 93.48 | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 19 | 5.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24,810,000.00 | 24,810,000.00 | 24,674,500.00 | 99.45 | 5 Jenis | 5 Jenis |
| 20 | 5.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12,495,000.00 | 12,495,000.00 | 12,485,000.00 | 99.92 | 1 Paket | 1 Paket |
| | 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 859,171,732.00 | 829,075,523.00 | 718,643,584.00 | 86.68 | | |
| 21 | 5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 232,913,720.00 | 152,913,745.00 | 137,040,534.00 | 89.62 | 1 Dokumen / 280 Orang | 1 Dokumen / 0 Orang |
| 22 | 5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 49,999,760.00 | 49,999,760.00 | 38,209,914.00 | 76.42 | 400 SK | 520 SK |
| 23 | 5.03.02.1.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 385,020,790.00 | 465,013,790.00 | 413,157,208.00 | 88.85 | 12 Orang / 100 Orang | 17 Orang / 100 Orang |
| 24 | 5.03.02.1.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 191,237,462.00 | 161,148,228.00 | 130,235,928.00 | 80.82 | 30 Buku / 1.500 Dokumen / 350 Kartu / 11.000 Data Pegawai / 100 Informasi / 1 Aplikasi | 30 Buku / 1.500 Dokumen / 375 Kartu / 11.000 Data Pegawai / 203 Informasi / 1 Aplikasi |

| No. | Kode Rekening | Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran Murni | Anggaran Setelah APBD-P | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi Anggaran | Target Kinerja | Realisasi Target Kinerja |
|-----|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | 1,148,575,057.00 | 1,323,576,568.00 | 976,519,702.00 | 73.78 | | |
| 25 | 5.03 . 02 . 1.02 . 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 149,999,915.00 | 120,035,426.00 | 107,705,009.00 | 89.73 | 4.800 SK / 420 SK / 5.500 SK | 4.383 SK / 375 SK / 4.034 SK |
| 26 | 5.03 . 02 . 1.02 . 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 198,585,800.00 | 192,819,800.00 | 178,094,283.00 | 92.36 | 2.800 SK / 2 SK | 2.800 SK / 3 SK |
| 27 | 5.03 . 02 . 1.02 . 03 | Pengelolaan Promosi ASN | 799,989,342.00 | 1,010,721,342.00 | 690,720,410.00 | 68.34 | 20 JPT Pratama / 600 Pejabat Administrasi | 22 JPT Pratama / 549 Pejabat Administrasi |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | 695,148,862.00 | 512,089,322.00 | 467,629,876.00 | 91.32 | | |
| 28 | 5.03.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 62,764,810.00 | 31,872,810.00 | 27,273,459.00 | 85.57 | 800 Orang | 800 Orang |
| 29 | 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 5,050,100.00 | 5,050,100.00 | 5,050,100.00 | 100.00 | 25 Orang | 5 Orang |
| 30 | 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 437,719,580.00 | 337,988,580.00 | 315,813,142.00 | 93.44 | 12 Orang / 300 SK | 12 Orang / 300 SK |
| 31 | 5.03.02.1.03.09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 65,459,150.00 | 47,306,550.00 | 39,361,997.00 | 83.21 | 50 Orang | 11 Orang |
| 32 | 5.03.02.1.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 124,155,222.00 | 89,871,282.00 | 80,131,178.00 | 89.16 | 400 SK | 924 SK |
| | 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 310,828,341.00 | 220,159,961.00 | 189,222,154.00 | 85.95 | | |
| 33 | 5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 87,151,152.00 | 56,613,152.00 | 40,408,208.00 | 71.38 | 100 ASN / 12 Dokumen | 43 ASN / 12 Dokumen |
| 34 | 5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | 89,509,822.00 | 59,523,522.00 | 52,737,440.00 | 88.60 | 450 Orang / 12 Orang / 950 Orang | 138 Orang / 0 Orang / 350 Orang |
| 35 | 5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | 20,567,547.00 | 20,567,547.00 | 19,704,178.00 | 95.80 | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 36 | 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 113,599,820.00 | 83,455,740.00 | 76,372,328.00 | 91.51 | 20 Laporan | 26 Laporan |
| | | TOTAL PAGU ANGGARAN | 17,655,725,926.00 | 16,666,774,918.00 | 14,758,064,593.00 | 88.55 | | |

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | |
|----|---|--|------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------|----|------|------------------|--|-------------------|--|-------|--|-------------------|--|-------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip | Indeks | 600 | 86,649,565,453.11 | 500 | 64,547,700,062.00 | 100 | 13,206,254,940.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3,662,978,420.00 | 100 | 12,406,049,277.00 | 100 | 93.94 | 600 | 76,953,749,339.00 | 100.00 | 88.81 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 1,132,948,747.45 | 70 | 861,090,214.00 | 75 | 196,632,922.00 | 10 | 20 | 10 | | 95,729,750.00 | 40 | 175,938,572.00 | 53.33 | 89.48 | 110 | 1,037,028,786.00 | 110.00 | 91.53 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 25 | 199,571,719.03 | 20 | 143,972,838.00 | 5 | 52,190,200.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21,680,100.00 | 5 | 48,451,878.00 | 100.00 | 92.84 | 25 | 192,424,716.00 | 100.00 | 96.42 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 6 | 933,377,028.42 | 5 | 717,117,376.00 | 1 | 144,442,722.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,049,650.00 | 1 | 127,486,694.00 | 100.00 | 88.26 | 6 | 844,604,070.00 | 100.00 | 90.49 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 74,947,230,583.06 | 70 | 55,018,680,190.00 | 75 | 11,869,799,606.00 | 15 | 22.5 | 15 | 22.5 | 3,033,878,647.00 | 75 | 10,999,579,268.00 | 100.00 | 92.67 | 145 | 66,018,259,458.00 | 145.00 | 88.09 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rentang Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan | Bulan | 72 | 1,059,623,583.08 | 60 | 834,097,802.00 | 12 | 152,929,281.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98,985,900.00 | 12 | 140,289,281.00 | 100.00 | 91.73 | 72 | 974,387,083.00 | 100.00 | 91.96 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 5 | 95,683,071.00 | 4 | 80,777,950.00 | 1 | 14,411,171.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,369,900.00 | 1 | 13,606,931.00 | 100.00 | 94.42 | 5 | 94,384,881.00 | 100.00 | 98.64 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rentang Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Bulan | 78 | 73,791,923,928.98 | 62 | 54,103,804,438.00 | 14 | 11,702,459,154.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,931,522,847.00 | 12 | 10,845,683,056.00 | 85.71 | 92.68 | 74 | 64,949,487,494.00 | 94.87 | 88.02 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase | 75 | 520,163,612.00 | 50.0 | 468,520,236.00 | 75 | 18,455,656.00 | 0 | 30.00 | 0 | 45 | 13,625,000.00 | 75 | 18,259,000.00 | 100.00 | 98.93 | 125 | 199,137,736.00 | 166.67 | 38.28 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian | Kali | 5 | 214,412,112.00 | 3 | 180,878,736.00 | 1 | 18,455,656.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,625,000.00 | 1 | 18,259,000.00 | 100.00 | 98.93 | 4 | 199,137,736.00 | 80.00 | 92.88 |

| NO | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | | |
|----|---|--|------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|----------------|--|----------------|--|--------|--|------------------|--|--------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7 | 14=6+12 | 15=14/5x100% | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Stel | 705 | 305,751,500.00 | 501 | 287,641,500.00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 501 | 287,641,500.00 | 71.06 | 94.08 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | 75 | 4,892,107,699.60 | 70 | 4,306,236,538.00 | 75 | 311,002,002.00 | 10 | 20 | 30 | 15 | 195,534,467.00 | 75 | 359,841,795.00 | 100.00 | 115.70 | 145 | 4,666,078,333.00 | 193.33 | 95.38 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 72 | 60,922,130.00 | 60 | 51,302,370.00 | 12 | 8,999,130.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,755,986.00 | 12 | 8,999,130.00 | 100.00 | 100.00 | 72 | 60,301,500.00 | 100.00 | 98.98 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 48 | 1,469,537,950.00 | 36 | 1,389,842,208.00 | 2 | 14,947,400.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102,395,000.00 | 5 | 102,395,000.00 | 250.00 | 685.04 | 41 | 1,492,237,208.00 | 85.42 | 101.54 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bulan | 72 | 142,362,080.00 | 60 | 123,043,740.00 | 12 | 18,000,000.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,222,500.00 | 12 | 17,392,500.00 | 100.00 | 96.63 | 72 | 140,436,240.00 | 100.00 | 98.65 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 72 | 112,135,680.00 | 60 | 90,616,000.00 | 12 | 16,377,680.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,684,675.00 | 12 | 15,577,265.00 | 100.00 | 95.11 | 72 | 106,193,265.00 | 100.00 | 94.70 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Rentang Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu | Bulan | 72 | 138,155,000.00 | 60 | 125,859,450.00 | 12 | 9,555,000.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,655,000.00 | 12 | 9,555,000.00 | 100.00 | 100.00 | 72 | 135,414,450.00 | 100.00 | 98.02 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Kali | 720 | 2,643,094,557.60 | 190 | 2,235,412,022.00 | 90 | 207,504,200.00 | 1 | 15 | 12 | 42 | 47,060,739.00 | 70 | 163,199,900.00 | 77.78 | 78.65 | 260 | 2,398,611,922.00 | 36.11 | 90.75 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rentang Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Bulan | 72 | 325,900,302.00 | 60 | 290,160,748.00 | 12 | 35,618,592.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19,760,567.00 | 12 | 42,723,000.00 | 100.00 | 119.95 | 72 | 332,883,748.00 | 100.00 | 102.14 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Persentase | 75 | 2,962,325,421.00 | 70 | 2,081,650,372.00 | 75 | 573,159,754.00 | 15 | 20 | 30 | 10 | 221,614,556.00 | 75 | 628,410,347.00 | 100.00 | 109.64 | 145 | 2,710,060,719.00 | 193.33 | 91.48 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 72 | 37,691,200.00 | 60 | 26,056,162.00 | 12 | 3,529,200.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,405,500.00 | 12 | 2,409,500.00 | 100.00 | 68.27 | 72 | 28,465,662.00 | 100.00 | 75.52 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 72 | 1,872,518,910.00 | 60 | 1,214,596,110.00 | 12 | 360,156,978.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140,252,686.00 | 12 | 407,628,393.00 | 100.00 | 113.18 | 72 | 1,622,224,503.00 | 100.00 | 86.63 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | 72 | 1,052,115,311.00 | 60 | 840,998,100.00 | 12 | 209,473,576.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79,956,370.00 | 12 | 218,372,454.00 | 100.00 | 104.25 | 72 | 1,059,370,554.00 | 100.00 | 100.69 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Persentase | 75 | 2,194,789,390.00 | 70 | 1,811,522,512.00 | 75 | 237,205,000.00 | 13 | 24 | 7 | 31 | 102,596,000.00 | 75 | 224,020,295.00 | 100.00 | 94.44 | 145 | 2,035,542,807.00 | 193.33 | 92.74 | |

| NO | Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dielevaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | | |
|----|--|---|---------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------------------|--|-------------------------|---|---------------|--|--------------------------|--|--------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7 | 14=6+12 | 15=14/5x100% | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Bulan | 72 | 1,230,925,895.98 | 60 | 886,173,612.00 | 12 | 199,900,000.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88,519,000.00 | 12 | 186,860,795.00 | 100.00 | 93.48 | 72 | 1,073,034,407.00 | 100.00 | 87.17 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor | Jenis | 26 | 260,810,000.00 | 21 | 235,995,000.00 | 5 | 24,810,000.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14,077,000.00 | 5 | 24,674,500.00 | 100.00 | 99.45 | 26 | 260,669,500.00 | 100.00 | 99.95 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Paket | 6 | 703,053,494.02 | 5 | 689,353,900.00 | 1 | 12,495,000.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 12,485,000.00 | 100.00 | 99.92 | 6 | 701,838,900.00 | 100.00 | 99.83 | |
| 2 | PROGRAM KEGAWAIAAN DAERAH | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | 225 | 24,831,205,362.70 | 200 | 19,016,440,576.00 | 225 | 2,247,939,914.00 | 15 | 65 | 35 | | 1,314,461,649.00 | 115 | 2,352,015,316.00 | 51.11 | 104.63 | 315 | 21,368,455,892.00 | 140.00 | 86.05 | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 60 | | 50 | | 60 | | 4 | 17 | 9 | | 30 | | 50.00 | | 80 | | 133.33 | | | |
| | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase | 90 | 6,649,627,535.70 | 80 | 5,239,268,612.75 | 90 | 479,075,523.00 | 5 | 20 | | | 485,097,735.00 | 25 | 718,643,584.00 | 27.78 | 150.01 | 105 | 5,957,912,196.75 | 116.67 | 89.60 | |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen | 16 | 345,150,651.09 | 12 | 321,070,498.00 | 1 | 152,913,745.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56,883,214.00 | 1 | 137,040,534.00 | 100.00 | 89.62 | 13 | 1,705,349,916.00 | 81.25 | 79.60 | |
| | | Jumlah formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN | Orang | 1150 | 1,797,183,980.68 | 341 | 1,247,238,884.00 | 280 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00 | | 341 | | 29.65 | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan | SK | 2050 | 268,892,360.00 | 1661 | 215,236,607.75 | 400 | 49,999,760.00 | 60 | 70 | 210 | 180 | 17,422,354.00 | 520 | 38,209,914.00 | 130.00 | 76.42 | 2181 | 253,446,521.75 | 106.39 | 94.26 | |
| | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Peserta MTQ KORPRI Tingkat Nasional | Orang | 526 | 2,163,666,790.00 | 380 | 1,700,833,229.00 | 12 | 115,013,790.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 362,288,102.00 | 17 | 413,157,208.00 | 141.67 | 359.22 | 397 | 2,221,471,006.00 | 75.48 | 96.24 | |
| | | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi | Orang | 450 | 144,609,261.10 | 200 | 107,480,569.00 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100.00 | | 300 | | 66.67 | | | |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | |
|----|---|--|--------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|----------------|--|----------------|--|-------|--|------------------|--|--------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I II III IV | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | 12=8+9+10+11 |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7 | 14=6+12 | 15=14/5x100% | | | | | | | | |
| | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi | Buku | 330 | 277,405,860.00 | 300 | 248,795,250.00 | 30 | 161,148,228.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 48,504,065.00 | 60 | 130,235,928.00 | 200.00 | 80.82 | 360 | 1,777,644,753.00 | 109.09 | 92.10 |
| | | Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik | Dokumen | 6100 | 378,879,722.46 | 5100 | 371,468,847.00 | 1500 | | 375 | 375 | 0 | 750 | 1500 | 100.00 | 6600 | 108.20 | | | | | |
| | | Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) | Kartu | 2490 | 167,152,332.58 | 1992 | 166,897,502.00 | 350 | | 0 | 181 | 10 | 12 | 203 | 58.00 | 2195 | 88.15 | | | | | |
| | | Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Kepegawaian | Data Pegawai | 58000 | 832,234,098.00 | 47000 | 617,575,510.00 | 11000 | | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 11000 | 100.00 | 58000 | 100.00 | | | | | |
| | | Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Informasi Kepegawaian | Informasi | 600 | | 526 | | 100 | | 25 | 25 | 50 | 103 | 203 | 203.00 | 729 | 121.50 | | | | | |
| | | Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | Aplikasi | 5 | 274,452,479.79 | 4 | 242,671,716.00 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 5 | 100.00 | | | | | |
| | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | Persentase | 95 | 8,759,382,192.00 | 85 | 5,811,926,426.25 | 95 | 1,023,576,568.00 | 7 | 15 | 9 | 64 | 652,793,366.00 | 95 | 976,519,702.00 | 100.00 | 95.40 | 180 | 6,788,446,128.25 | 189.47 | 77.50 |
| | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi | SK | 29757 | 767,891,955.00 | 22957 | 608,409,212.00 | 4800 | 120,035,426.00 | 2394 | 231 | 425 | 1333 | 52,072,203.00 | 4383 | 107,705,009.00 | 91.31 | 89.73 | 27340 | 716,114,221.00 | 91.88 | 93.26 |
| | | Jumlah SK Mutasi | SK | 2919 | | 1669 | | 250 | | 72 | 64 | 167 | 72 | 375 | 150.00 | 2044 | 70.02 | | | | | |
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan | SK | 15300 | 855,263,600.00 | 14034 | 645,709,823.25 | 2800 | 192,819,800.00 | 0 | 1440 | 1259 | 101 | 22,446,500.00 | 2800 | 178,094,283.00 | 100.00 | 92.36 | 16834 | 823,804,106.25 | 110.03 | 96.32 |
| | | Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja | SK | 9 | | 7 | | 2 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 150.00 | 10 | 111.11 | | | | | |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | |
|----|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------|-----|----|-----|----------------|--|----------------|--|--------|--|------------------|--|-------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi | JPT Pratama | 231 | 4,986,178,497.00 | 84 | 2,968,197,479.00 | 40 | 710,721,342.00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 578,274,663.00 | 22 | 690,720,410.00 | 55.00 | 97.19 | 106 | 5,248,527,801.00 | 45.89 | 73.55 |
| | | Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi | Pejabat Administrasi | 1790 | 2,150,048,140.00 | 2725 | 1,589,609,912.00 | 450 | | 0 | 0 | 0 | 459 | | 459 | | 102.00 | | 3184 | | 177.88 | |
| | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase | 90 | 6,738,781,495.50 | 80 | 5,716,648,533.00 | 90 | 525,127,862.00 | 5 | 40 | 25 | 20 | 86,443,575.00 | 90 | 467,629,876.00 | 100.00 | 89.05 | 170 | 6,184,278,409.00 | 188.89 | 91.77 |
| | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Orang | 4474 | 595,691,970.00 | 2686 | 484,880,443.00 | 800 | 31,872,810.00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 7,909,570.00 | 800 | 27,273,459.00 | 100 | 85.57 | 3486 | 512,153,902.00 | 77.92 | 85.98 |
| | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Teknis | Orang | 15 | 336,229,675.00 | 32 | 297,491,764.50 | 25 | 5,050,100.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,497,900.00 | 5 | 5,050,100.00 | 20 | 100.00 | 37 | 302,541,864.50 | 246.67 | 89.98 |
| | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing | Orang | 139 | 4,171,027,353.50 | 122 | 3,984,907,242.00 | 12 | 337,988,580.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 34,859,718.00 | 12 | 315,813,142.00 | 100 | 93.44 | 134 | 4,444,181,356.00 | 96.40 | 93.51 |
| | | Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara | SK | 1287 | 581,452,880.00 | 987 | 143,460,972.00 | 300 | | 0 | 150 | 0 | 150 | | 300 | | 100 | | 1287 | | 100.00 | |
| | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional | Orang | 15 | 396,638,725.00 | 32 | 297,491,764.50 | 50 | 48,161,150.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13,583,398.00 | 11 | 39,361,997.00 | 22 | 81.73 | 43 | 336,853,761.50 | 286.67 | 84.93 |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2021 (%) | |
|---|---|--|------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--|-------------------|--|-------|--|------------------|--|--------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | K | K | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 812 | 657,740,892.00 | 2468 | 508,416,347.00 | 400 | 102,055,222.00 | 270 | 319 | 165 | 170 | 27,592,989.00 | 924 | 80,131,178.00 | 231 | 78.52 | 3392 | 588,547,525.00 | 417.73 | 89.48 |
| | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase | 95 | 2,683,414,139.50 | 85 | 2,248,597,004.00 | 95 | 220,159,961.00 | 6 | 24 | 13 | 52 | 90,126,973.00 | 95 | 189,222,154.00 | 100.00 | 85.95 | 180.00 | 2,437,819,158.00 | 189.47 | 90.85 |
| | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | ASN | 500 | 551,032,048.00 | 400 | 517,731,288.00 | 100 | 56,613,152.00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15,055,506.00 | 43 | 40,408,208.00 | 43.00 | 71.38 | 443 | 661,458,896.00 | 88.60 | 87.08 |
| | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 72 | 208,550,052.00 | 60 | 103,319,400.00 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 12 | | 100.00 | | 72 | | 100.00 | |
| | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | Orang | 4967 | 777,980,544.50 | 3439 | 651,729,280.00 | 450 | 59,523,522.00 | 0 | 65 | 55 | 18 | 30,013,704.00 | 138 | 52,737,440.00 | 30.67 | 88.60 | 3577 | 704,466,720.00 | 72.02 | 90.55 |
| | | Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | Orang | 25 | | 25 | | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 25 | | 100 | |
| | | Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS | Orang | 3867 | | 2762 | | 950 | | 0 | 0 | 0 | 350 | | 350 | | 36.84 | | 3112 | | 80.48 | |
| | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN | Laporan | 72 | 283,786,071.00 | 60 | 235,574,058.00 | 12 | 20,567,547.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,670,230.00 | 12 | 19,704,178.00 | 100 | 95.80 | 72 | 255,278,236.00 | 100.00 | 89.95 |
| | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 104 | 862,065,424.00 | 58 | 740,242,978.00 | 20 | 83,455,740.00 | 0 | 2 | 6 | 18 | 40,387,533.00 | 26 | 76,372,328.00 | 130 | 91.51 | 84 | 816,615,306.00 | 80.77 | 94.73 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 81.00 | 86.82 | | | | 89.81 | 90.58 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Tinggi | | | | Tinggi | Tinggi |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | 15,454,194,854.00 | 16.11% | 27.62% | 19.56% | 32.21% | 4,977,440,069.00 | 95.50% | 14,758,064,593.00 | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | 88.06 | 99.29 | | | | 153.33 | 87.43 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d 2) | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|----|---|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|--|---|---|-------------------|---------------------------------|------------------|----|------------------|-----|----|----|----|--|------------------|--|-------|--|------------------|--|------|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip | Indeks | BB Indeks | 121,464,139,210.17 | | | BB Indeks | 14,974,141,697.00 | 0 | 1,993,078,719.00 | 0 | 3,908,584,911.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5,901,663,630.00 | 0 | 39.41 | 0 | 5,901,663,630.00 | 0.00 | 4.86 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 1,550,000,000.00 | 0 | - | 85 | 179,170,388.00 | 15 | 31,628,952.00 | 0 | 29,141,165.00 | 0 | - | 0 | - | 15 | 60,770,117.00 | 17.65 | 33.92 | 15 | 60,770,117.00 | 15.00 | 3.92 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 125,000,000.00 | 0 | - | 2 | 18,670,388.00 | 1 | 8,696,900.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 8,696,900.00 | 50.00 | 46.58 | 1 | 8,696,900.00 | 10.00 | 6.96 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 6 | 1,250,000,000.00 | 0 | - | 1 | 135,000,000.00 | 0 | 22,932,052.00 | 0 | 29,141,165.00 | 0 | - | 1 | - | 1 | 52,073,217.00 | 100.00 | 38.57 | 1 | 52,073,217.00 | 16.67 | 4.17 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 15 | 175,000,000.00 | 0 | - | 3 | 25,500,000.00 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 33.33 | 0.00 | 1 | - | 6.67 | 0.00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 87,362,000,000.00 | 0 | - | 85 | 12,718,932,447.00 | 12 | 1,705,589,721.00 | 0 | 3,396,398,968.00 | 0 | - | 0 | - | 12 | 5,101,988,689.00 | 14.12 | 40.11 | 12 | 5,101,988,689.00 | 12.00 | 5.84 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 480 | 85,865,000,000.00 | 0 | - | 90 | 12,563,932,447.00 | 87 | 1,663,981,699.00 | 87 | 3,362,785,956.00 | 0 | - | 0 | - | 174 | 5,026,767,655.00 | 193.33 | 40.01 | 174 | 5,026,767,655.00 | 36.25 | 5.85 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 1,370,000,000.00 | 0 | - | 12 | 145,000,000.00 | 3 | 34,442,038.00 | 3 | 33,613,012.00 | 0 | - | 0 | - | 6 | 68,055,050.00 | 50.00 | 46.93 | 6 | 68,055,050.00 | 10.00 | 4.97 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 127,000,000.00 | 0 | - | 1 | 10,000,000.00 | 0 | 7,165,984.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7,165,984.00 | 0.00 | 71.66 | 0 | 7,165,984.00 | 0.00 | 5.64 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 1,531,627,500.00 | 0.0 | - | 85 | 124,798,000.00 | 4 | 4,470,000.00 | 0 | 61,177,000.00 | 0 | - | 0 | - | 4 | 65,647,000.00 | 4.71 | 52.60 | 4 | 65,647,000.00 | 4.00 | 4.29 |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|----|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|----------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 5 | 331,357,500.00 | 0 | - | 1 | 59,800,000.00 | 0 | - | 1 | 59,800,000.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 59,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 59,800,000.00 | 20.00 | 18.05 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 425 | 663,130,000.00 | 0 | - | 10 | 14,998,000.00 | 3 | 4,470,000.00 | 3 | 1,377,000.00 | 0 | - | 1 | - | 7 | 5,847,000.00 | 70.00 | 38.99 | 7 | 5,847,000.00 | 1.65 | 0.88 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 75 | 537,140,000.00 | 0 | - | 15 | 50,000,000.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 4,837,778,800.00 | 0 | - | 85 | 405,760,875.00 | 17 | 79,617,844.00 | 0 | 61,182,178.00 | 0 | - | 0 | - | 17 | 140,800,022.00 | 20.00 | 34.70 | 17 | 140,800,022.00 | 17.00 | 2.91 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 5 | 120,000,000.00 | 0 | - | 1 | 8,500,000.00 | 1 | 998,041.00 | 0 | 1,749,248.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2,747,289.00 | 100.00 | 32.32 | 1 | 2,747,289.00 | 20.00 | 2.29 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 5 | 1,000,000,000.00 | 0 | - | 1 | 14,950,000.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 5 | 126,000,000.00 | 0 | - | 1 | 15,000,000.00 | 1 | 6,290,000.00 | 0 | 3,990,000.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 10,280,000.00 | 100.00 | 68.53 | 1 | 10,280,000.00 | 20.00 | 8.16 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 5 | 110,000,000.00 | 0 | - | 1 | 16,356,675.00 | 1 | 1,233,400.00 | 0 | 854,570.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2,087,970.00 | 100.00 | 12.77 | 1 | 2,087,970.00 | 20.00 | 1.90 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 80,000,000.00 | 0 | - | 1 | 8,450,000.00 | 1 | 2,600,000.00 | 0 | 780,000.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3,380,000.00 | 100.00 | 40.00 | 1 | 3,380,000.00 | 20.00 | 4.23 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5 | 2,670,138,800.00 | 0 | - | 1 | 307,504,200.00 | 0 | 60,731,701.00 | 0 | 47,652,470.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 108,384,171.00 | 0.00 | 35.25 | 0 | 108,384,171.00 | 0.00 | 4.06 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 7500 | 731,640,000.00 | 0 | - | 300 | 35,000,000.00 | 25 | 7,764,702.00 | 20 | 6,155,890.00 | 0 | - | 0 | - | 45 | 13,920,592.00 | 15.00 | 39.77 | 45 | 13,920,592.00 | 0.60 | 1.90 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 2,690,905,000.00 | 0 | - | 90 | 34,482,618.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Unit | 20 | 1,475,000,000.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|----|--|--|------------|-------------------------------------|-------------------|--|----|---|------------------|---------------------------------|----------------|---|----------------|----|----|----|----|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Paket | 5 | 552,775,000.00 | 0 | - | 1 | 4,677,658.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 663,130,000.00 | 0 | - | 12 | 29,804,960.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 4,122,976,279.18 | 0 | - | 85 | 737,617,369.00 | 20 | 160,047,202.00 | 0 | 128,727,100.00 | 0 | - | 0 | - | 20 | 288,774,302.00 | 23.53 | 39.15 | 20 | 288,774,302.00 | 20.00 | 7.00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 5 | 23,684,020.64 | 0 | - | 1 | 3,529,200.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 5 | 2,762,315,901.17 | 0 | - | 1 | 478,904,075.00 | 0 | 98,890,679.00 | 0 | 65,957,297.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 164,847,976.00 | 0.00 | 34.42 | 0 | 164,847,976.00 | 0.00 | 5.97 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 5 | 1,336,976,357.37 | 0 | - | 1 | 255,184,094.00 | 0 | 61,156,523.00 | 0 | 62,769,803.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 123,926,326.00 | 0.00 | 48.56 | 0 | 123,926,326.00 | 0.00 | 9.27 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 19,368,851,630.99 | 0 | - | 85 | 773,380,000.00 | 2 | 11,725,000.00 | 0 | 231,958,500.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 243,683,500.00 | 0.00 | 31.51 | 0 | 243,683,500.00 | 0.00 | 1.26 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 25 | 1,415,837,550.00 | 0 | - | 25 | 199,770,000.00 | 0 | 4,500,000.00 | 3 | 25,668,500.00 | 0 | - | 0 | - | 3 | 30,168,500.00 | 12.00 | 15.10 | 3 | 30,168,500.00 | 12.00 | 2.13 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Unit | 75 | 292,159,080.99 | 0 | - | 25 | 18,810,000.00 | 6 | 4,870,000.00 | 4 | 3,945,000.00 | 0 | - | 0 | - | 10 | 8,815,000.00 | 40.00 | 46.86 | 10 | 8,815,000.00 | 13.33 | 3.02 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 17,550,000,000.00 | 0 | - | 1 | 550,000,000.00 | 0 | - | 0 | 199,945,000.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 199,945,000.00 | 0.00 | 36.35 | 0 | 199,945,000.00 | 0.00 | 1.14 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 35 | 110,855,000.00 | 0 | - | 10 | 4,800,000.00 | 5 | 2,355,000.00 | 4 | 2,400,000.00 | 0 | - | 0 | - | 9 | 4,755,000.00 | 90.00 | 99.06 | 9 | 4,755,000.00 | 25.71 | 4.29 |
| 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | 350 | 41,135,930,000.00 | 0 | - | 250 | 5,235,479,143.00 | 0 | 318,516,355.00 | | 829,623,583.00 | | - | | - | 1,148,139,938.00 | 0.00 | 21.93 | 0 | 1,148,139,938.00 | 0.00 | 2.79 | |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|----|--|---|------------|-------------------------------------|-------------------|--|----|---|------------------|---------------------------------|---------------|---|----------------|----|----|----|----|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|-------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 90 | | 0 | | 70 | | 0 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0 | | 0.00 | |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase | 90 | 11,175,000,000.00 | 0 | - | 90 | 1,614,492,528.00 | 5 | 85,343,471.00 | 0 | 115,420,755.00 | 0 | - | 0 | - | 5 | 200,764,226.00 | 5.56 | 12.44 | 5 | 200,764,226.00 | 5.56 | 1.80 |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen | 5 | 6,100,000,000.00 | 0 | - | 1 | 1,230,403,696.00 | 0 | 36,076,800.00 | 0 | 63,707,471.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 99,784,271.00 | 0.00 | 8.11 | 0 | 99,784,271.00 | 0.00 | 1.64 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 5 | 400,000,000.00 | 0 | - | 1 | 49,999,760.00 | 0 | 4,965,176.00 | 0 | 6,421,450.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 11,386,626.00 | 0.00 | 22.77 | 0 | 11,386,626.00 | 0.00 | 2.85 |
| | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi | Lembaga | 1 | 3,050,000,000.00 | 0 | - | 1 | 75,000,000.00 | 0 | 15,184,455.00 | 0 | 7,279,700.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 22,464,155.00 | 0.00 | 29.95 | 0 | 22,464,155.00 | 0.00 | 0.74 |
| | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Laporan | 5 | 1,625,000,000.00 | 0 | - | 1 | 259,089,072.00 | 0 | 29,117,040.00 | 0 | 38,012,134.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 67,129,174.00 | 0.00 | 25.91 | 0 | 67,129,174.00 | 0.00 | 4.13 |
| | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | Persentase | 95 | 6,269,999,575.00 | 0 | - | 95 | 1,297,855,225.00 | 7 | 92,845,144.00 | 0 | 512,767,976.00 | 0 | - | 0 | - | 7 | 605,613,120.00 | 7.37 | 46.66 | 7 | 605,613,120.00 | 7.37 | 9.66 |
| | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen | 5 | 749,999,575.00 | 0 | - | 1 | 120,035,425.00 | 0 | 25,741,798.00 | 0 | 26,141,645.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 51,883,443.00 | 0.00 | 43.22 | 0 | 51,883,443.00 | 0.00 | 6.92 |
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Laporan | 5 | 1,200,000,000.00 | 0 | - | 1 | 177,819,800.00 | 0 | 67,103,346.00 | 0 | 38,157,790.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 105,261,136.00 | 0.00 | 59.20 | 0 | 105,261,136.00 | 0.00 | 8.77 |
| | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 5 | 4,320,000,000.00 | 0 | - | 1 | 1,000,000,000.00 | 0 | - | 0 | 448,468,541.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 448,468,541.00 | 0.00 | 44.85 | 0 | 448,468,541.00 | 0.00 | 10.38 |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Program SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|----|--|--|------------|-------------------------------------|-------------------|--|----|---|------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|-----|----|----|----|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|------|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase | 90 | 20,322,776,223.00 | 80 | - | 90 | 1,975,744,092.00 | 5 | 83,360,740.00 | 0 | 150,444,869.00 | 0 | - | 0 | - | 5 | 233,805,609.00 | 5.56 | 11.83 | 85 | 233,805,609.00 | 94.44 | 1.15 |
| | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya | Orang | 4474 | 821,593,680.00 | 0 | - | 800 | 31,872,810.00 | 0 | 11,834,535.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 11,834,535.00 | 0 | 37.13 | 0 | 11,834,535.00 | 0.00 | 1.44 |
| | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen | 5 | 5,775,000,000.00 | 0 | - | 1 | 250,000,000.00 | 0 | 10,783,080.00 | 0 | 14,084,750.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 24,867,830.00 | 0 | 9.95 | 0 | 24,867,830.00 | 0.00 | 0.43 |
| | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola | Dokumen | 5 | 8,953,142,543.00 | 0 | - | 1 | 1,477,000,000.00 | 0 | 10,350,000.00 | 0 | 120,745,900.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 131,095,900.00 | 0 | 8.88 | 0 | 131,095,900.00 | 0.00 | 1.46 |
| | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional | Dokumen | 5 | 3,050,000,000.00 | 0 | - | 1 | 107,000,000.00 | 0 | 23,912,712.00 | 0 | 8,178,104.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 32,090,816.00 | 0 | 29.99 | 0 | 32,090,816.00 | 0.00 | 1.05 |
| | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Dokumen | 5 | 1,723,040,000.00 | 0 | - | 1 | 109,871,282.00 | 0 | 26,480,413.00 | 0 | 7,436,115.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 33,916,528.00 | 0 | 30.87 | 0 | 33,916,528.00 | 0.00 | 1.97 |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase | 95 | 3,368,154,202.00 | 0 | - | 95 | 347,387,298.00 | 6 | 56,967,000.00 | 0 | 50,989,983.00 | 0 | - | 0 | - | 6 | 107,956,983.00 | 6.32 | 31.08 | 6.00 | 107,956,983.00 | 6.32 | 3.21 |

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome) | Satuan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2026 (%) | |
|---|--|--|---------|-------------------------------------|------------------|--|----|---|-------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|-------|----|-------|----|--|------------------|--|-------|--|---------------|--|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| 1 | 3 | 4 | 4.A | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 60 | 1,117,645,323.50 | 0 | - | 12 | 75,000,000.00 | 3 | 21,572,400.00 | 3 | 20,105,281.00 | 0 | - | 0 | - | 6 | 41,677,681.00 | 50.00 | 55.57 | 6 | 41,677,681.00 | 10.00 | 3.73 |
| | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | Orang | 4750 | 759,859,721.50 | 0 | - | 950 | 75,000,000.00 | 0 | 15,937,300.00 | 0 | 9,365,052.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | 25,302,352.00 | 0.00 | 33.74 | 0 | 25,302,352.00 | 0.00 | 3.33 |
| | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Orang | 215 | 427,649,157.00 | 0 | - | 43 | 31,294,848.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 106 | 1,063,000,000.00 | 0 | - | 20 | 166,092,450.00 | 0 | 19,457,300.00 | 5 | 21,519,650.00 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40,976,950.00 | 25 | 24.67 | 5 | 40,976,950.00 | 4.72 | 3.85 |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | 20,209,620,840.00 | 11.44% | 2,311,595,074.00 | 23.45% | 4,738,208,494.00 | 0.00% | - | 0.00% | - | 34.88% | 7,049,803,568.00 | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 25.19 | | | 0.00 | 3.13 | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan melalui target kinerja yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Provinsi Jambi telah melaksanakan pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Operasionalisasi dari Perda Nomor 8 tahun 2016 tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mendetilkkan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jambi selaku perangkat daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pemberhentian, perlindungan, dan sistem informasi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai dengan Renstra BKD Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026, maka dalam rencana kerja tahun 2023 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja capaian program/kegiatan pembangunan.

1. Target kinerja BKD Provinsi Jambi berdasarkan tujuan dan saran yang ingin dicapai pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

**Tabel 2.7 Target Kinerja Tujuan dan sasaran
BKD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | Target Kinerja Tahun 2024 | Target Kinerja Tahun 2025 | Target Kinerja Tahun 2026 |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. | Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 |
| | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | Indeks | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| | Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik | Predikat SAKIP | Nilai | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | Indeks | 78.00 | 81.00 | 86.00 | 90.00 | 93.00 |

2. Target kinerja BKD Provinsi Jambi berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

**Tabel 2.8 Target Kinerja Program dan Kegiatan
BKD Provinsi Jambi Tahun 2023**

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target |
|-----------------|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip | BB Indeks |
| 5.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen |
| 5.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target |
|---------------------|--|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang |
| 5.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen |
| 5.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket |
| 5.03.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang |
| 5.03.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang |
| 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket |
| 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket |
| 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket |
| 5.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen |
| 5.03.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1500 Dokumen |
| 5.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0% |
| 5.03.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 3 Unit |
| 5.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 1 Paket |
| 5.03.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit |
| 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan |
| 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 Laporan |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target |
|---------------------|--|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% |
| 5.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 25 Unit |
| 5.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 75 Unit |
| 5.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit |
| 5.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 35 Unit |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | 275 |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | 75 |
| 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 90% |
| 5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi | 1 Lembaga |
| 5.03.02.1.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Laporan |
| 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | 95% |
| 5.03.02.1.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Laporan |
| 5.03.02.1.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | 90% |
| 5.03.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya | 1200 Orang |
| 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.03.09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target |
|---------------------|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5.03.02.1.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen |
| 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 95% |
| 5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen |
| 5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | 950 Orang |
| 5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 43 Orang |
| 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 20 Laporan |

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi hanya melaksanakan urusan pemerintahan urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NSPK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai koordinator tunggal Bidang Kepegawaian Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Kepegawaian Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang kepegawaian daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target kinerja. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal optimalisasi pelayanan kepegawaian perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepegawaian secara lebih luas diseluruh Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemberian pelayanan kepegawaian dilakukan pelayanan ekstra dengan pembuatan SOP Berbasis standar Protokol Kesehatan didukung SDM baik kuantitas dan kualitasnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepegawaian daerah.

Kemudian, sumber daya aparatur harus memenuhi Standar Protokol kesehatan Covid 19. Menurut Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 standar protokol kesehatan Covid 19 yaitu:

1. Jaga Kebersihan Tangan
2. Jangan Menyentuh Wajah
3. Terapkan Etika Batuk Dan Bersin
4. Pakai Masker
5. Jaga Jarak
6. Isolasi Mandiri
7. Jaga Kesehatan

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi secara umum, antara lain :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan kepegawaian belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
- b. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja.
- c. Infrastruktur digital khusus pelayanan kepegawaian provinsi belum terintegrasi.
- d. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam pelayanan kepegawaian.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi ASN melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan kepegawaian daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan kepegawaian lainnya serta melakukan sosialisasi kepada ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam optimalisasi pelayanan kepegawaian daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam hal pelayanan kepegawaian sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan khusus yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian Rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| 1. | Pelayanan Publik yang belum memenuhi harapan masyarakat. | 1. Belum terinternalisasinya budaya birokrasi bersih dan melayani. | 1. Budaya organisasi yang selalu berubah-ubah. 2. Proses sosialisasi dan internalisasi yang belum optimal. 3. Pola pikir/mindset ASN sebagai pelayan masyarakat belum terwujud. |
| | | 2. Kompetensi ASN Provinsi Jambi yang belum merata. | 1. Program pengembangan Kompetensi belum bersinergi dengan BPSDM Provinsi Jambi. 2. Kebijakan penempatan ASN belum sepenuhnya disesuaikan dengan hasil <i>asesmen</i> . 3. Belum tersedianya mekanisme Knowledge Management yang dapat menjadi platform dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN. |
| 2. | Kinerja ASN Provinsi Jambi pada era Industri 4.0 sebagai landasan menjadi Jambi sebagai kota yang maju, lestari dan berbudaya belum optimal. | 1. Budaya inovasi perlu ditingkatkan dalam mengaselerasi sasaran pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. 2. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas ASN Pemprov. Jambi di semua lini. 3. Kurangnya pengetahuan tentang perubahan industry 4.0 dan tantangan global yang semakin kompleks. | 1. Belum optimalnya kebijakan reward and punishment yang dapat menstimulasi penyelesaian tugas secara efektif dan efisien. 1. Mindset/pola pikir dalam penyusunan anggaran masih konvensional dimana <i>line item budgeting</i> hanya mereplikasi program terdahulu, sehingga perlu diubah menjadi performance based budgeting , yang dapat terukur dan memberikan outcome/impact pada masyarakat. 1. Perlunya program pelatihan <i>softskil</i> terkait <i>transformation leadership</i> . 2. Implementasi system <i>e-government</i> belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh. |
| 3. | Profesionalitas ASN Provinsi Jambi yang dianggap masih rendah. | 1. Tatakelola dan Manajemen ASN Provinsi Jambi masih berlandaskan Kepegawaian/ Personalia. 2. Belum adanya ruang untuk mendorong inisiatif dan kreatifitas ASN Provinsi Jambi di semua lini. | 1. Belum terbentuknya mekanisme tata kelola dan manajemen ASN yang dianggap sebagai asset organisasi (<i>human capital management</i>). 2. Perlunya peningkatan koordinasi kerja antara BKD Provinsi Jambi dan BPSDM Provinsi Jambi dalam Pengembangan kapasitas ASN Provinsi Jambi. 1. Pola interaksi antara atasan – bawahan masih dipengaruhi nilai-nilai hierarkis dan menunggu arahan atasan. |

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Tabel 2.10.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Jambi Sesuai Hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|---|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jambi dan Luar Jambi | Nilai Sakip | BB Indeks | 37.202.272.528,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jambi dan Luar Jambi | Nilai Sakip | BB Indeks | 37.202.272.528,00 | |
| 5.03.01.1.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 310.000.000,00 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 310.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jambi | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jambi | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 250.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 35.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 35.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|--|---|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75% | 17.370.000.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75% | 17.370.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jambi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang | 17.100.000.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jambi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang | 17.100.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90% | 281.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90% | 281.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jambi | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 63.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jambi | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 63.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 126.000.000,00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 126.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 92.000.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 92.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 893.690.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 893.690.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jambi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 24.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jambi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 24.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jambi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 200.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jambi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 200.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jambi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 22.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jambi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 22.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jambi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jambi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jambi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 14.000.000,00 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jambi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 14.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 481.690.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 481.690.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------------|---|-------------------|-------------------------|--|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1500 Dokumen | 132.000.000,00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1500 Dokumen | 132.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 981.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 981.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jambi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 3 Unit | 750.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jambi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 3 Unit | 750.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jambi | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 1 Paket | 105.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Jambi | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 1 Paket | 105.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | 126.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | 126.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 771.043.831,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 771.043.831,00 | |
| 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.270.332,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.270.332,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------------|--|-------------------|--------------------------|--|--------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan | 524.700.598,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan | 524.700.598,00 | |
| 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 Laporan | 242.072.901,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 Laporan | 242.072.901,00 | |
| 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 16.595.538.697,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jambi | Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 16.595.538.697,00 | |
| 5.03.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jambi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 25 Unit | 269.010.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jambi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 25 Unit | 269.010.000,00 | |
| 5.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jambi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 75 Unit | 55.528.697,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jambi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 75 Unit | 55.528.697,00 | |
| 5.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 16.250.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 16.250.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 35 Unit | 21.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jambi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 35 Unit | 21.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|--|---|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Jambi dan Luar Jambi | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | 275 | 7.523.660.000,00 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Jambi dan Luar Jambi | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN | 275 | 7.523.660.000,00 | |
| | | | Indeks Profesionalitas ASN | 75 | | | | Indeks Profesionalitas ASN | 75 | | |
| 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 90% | 1.770.000.000,00 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 90% | 1.770.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 900.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi | 1 Lembaga | 500.000.000,00 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi | 1 Lembaga | 500.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Laporan | 300.000.000,00 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Laporan | 300.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | 95% | 1.329.999.915,00 | Mutasi dan Promosi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | 95% | 1.329.999.915,00 | |
| 5.03.02.1.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | 149.999.915,00 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | 149.999.915,00 | |
| 5.03.02.1.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Laporan | 230.000.000,00 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Laporan | 230.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | 950.000.000,00 | Pengelolaan Promosi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | 950.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | 90% | 3.865.284.993,00 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | 90% | 3.865.284.993,00 | |
| 5.03.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya | 1200 Orang | 126.659.850,00 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya | 1200 Orang | 126.659.850,00 | |
| 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | 1.075.000.000,00 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | 1.075.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola | 1 Dokumen | 1.800.625.143,00 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola | 1 Dokumen | 1.850.629.350,00 | |
| 5.03.02.1.03.09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 288.000.000,00 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 288.000.000,00 | |
| 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jambi dan Luar Jambi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 95% | 558.375.092,00 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jambi dan Luar Jambi | | 95% | 558.375.092,00 | |
| 5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | 196.090.092,00 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | 196.090.092,00 | |
| 5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | 950 Orang | 140.285.000,00 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | 950 Orang | 140.285.000,00 | |
| 5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 43 Orang | 67.000.000,00 | Pembinaan Disiplin ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 43 Orang | 67.000.000,00 | |

| Kode | Rencana Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 20 Laporan | 155.000.000,00 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jambi dan Luar Jambi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 20 Laporan | 155.000.000,00 | |
| Total Anggaran : | | | | | 44.725.932.528,00 | Total Anggaran : | | | | | 44.725.932.528,00 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian sehingga Badan Kepegawaian Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang kepegawaian daerah.

Tabel 2.11.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pada Badan Kepegawaian Daerah tidak terdapat adanya usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahun atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, disebutkan OPD Menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah pembangunan daerah, dengan mengacu pada RKPD provinsi yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan pembangunan melalui dokumen pembangunan yang aspiratif.

Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai dengan kebutuhan. Untuk membangun sistem manajemen ASN dituangkan dalam Regulasi dan Kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Badan Kepegawaian Negara dalam rangka mengemban Amanah mandate Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan “Mewujudkan Pengelola ASN yang professional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan

penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan Sistem Merit, maka terdapat 5 (lima) pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui :

- c. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- d. Penyelenggaraan manajemen ASN,
- e. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- f. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
- g. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN

yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Dengan Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcom/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) tujuan yakni :

- a. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN);
- d. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, khususnya pada sasaran “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi BKD Provinsi Jambi sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan BKD Provinsi Jambi adalah misi pertama yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan” yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi Jambi yaitu meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang disusun sebagai bentuk review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD agar sejalan Misi Kepala Daerah, dengan tujuan Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan dua sasaran yakni;

- 1). Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.
- 2). Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok “membantu gubernur menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BKD Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pemberhentian, perlindungan, dan sistem informasi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jambi 2021 - 2026

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2023 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi dan urusan kewenangan masing-masing OPD. Untuk menghasilkan suatu program dan kegiatan yang mencerminkan hasil yang dapat diukur makan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah membagi kedalam 2 program dan 11 kegiatan sesuai target sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023.

RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023, sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Mebel
 - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 4. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 1. Pengelolaan Mutasi ASN
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 3. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
 5. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 3. Pembinaan Disiplin ASN
 4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pencapaian tujuan dan sasaran renja Tahun 2023 di upayakan dengan melaksanakan program yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan detail program dan kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) | Target (16) | Rp (17) | Target (18) | Rp (19) | | | | | | | |
| | | | | | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | BB Indeks | | | | | | | |
| Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. | Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP | 8 | BB Indeks | 21.146.765.543,38 | BB Indeks | 37.202.272.528,92 | BB Indeks | 20.971.535.994,49 | BB Indeks | 21.182.228.821,69 | BB Indeks | 20.960.036.321,69 | BB Indeks | 21.182.228.821,69 | BB Indeks | 21.182.228.821,69 | BB Indeks | 121.464.139.210,17 | Provinsi Jambi | Provinsi Jambi | | | |
| | | | | | 85% | 310.000.000,00 | 90% | 310.000.000,00 | 95% | 310.000.000,00 | 100% | 310.000.000,00 | 100% | 310.000.000,00 | 100% | 310.000.000,00 | 100% | 310.000.000,00 | 100% | 1.550.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | Provinsi Jambi |
| | | | | | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 1 Laporan | 250.000.000,00 | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Provinsi Jambi |
| | | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | | | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | | | 3 Dokumen | 35.000.000,00 | Provinsi Jambi |
| | | | | | 3 Laporan | | 3 Laporan | | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 3 Laporan | 35.000.000,00 | | | 3 Laporan | 140.000.000,00 | Provinsi Jambi |
| | | | | | 85% | 17.237.000.000,00 | 85% | 17.370.000.000,00 | 85% | 17.550.000.000,00 | 90% | 17.370.000.000,00 | 95% | 17.550.000.000,00 | 100% | 17.620.000.000,00 | 100% | 17.585.000.000,00 | 100% | 17.620.000.000,00 | | | 100% | 87.362.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | | | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | | | 14 Bulan | 17.000.000.000,00 | Provinsi Jambi |
| | | | | | 90 Orang/Bulan | | 90 Orang/Bulan | | 90 Orang/Bulan | 17.100.000.000,00 | 90 Orang/Bulan | 17.100.000.000,00 | 95 Orang/Bulan | 17.250.000.000,00 | 100 Orang/Bulan | 17.250.000.000,00 | 105 Orang/Bulan | 17.255.000.000,00 | 105 Orang/Bulan | 17.260.000.000,00 | | | 390 Orang/Bulan | 68.865.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | | | 12 Bulan | 220.000.000,00 | 12 Bulan | 220.000.000,00 | 12 Bulan | 220.000.000,00 | 12 Bulan | 220.000.000,00 | 12 Dokumen | 275.000.000,00 | 12 Dokumen | 300.000.000,00 | 12 Dokumen | 300.000.000,00 | 12 Dokumen | 325.000.000,00 | | | 48 Dokumen | 1.150.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | | | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | | | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | Provinsi Jambi |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3) | Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) dan Kegiatan (Output) (4) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5) | KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18) | Lokasi (19) | | | | |
|---------------|----------------|--|--|---|------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--|------------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | |
| | | | | | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | | | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) |
| | | Kordinasi dan Pembentukan Kelembagaan Kelembagaan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 110.000.000,00 | | | | |
| | | Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah | 85% | 260.000.000,00 | 281.000.000,00 | 90% | 281.000.000,00 | 304.250.000,00 | 330.042.500,00 | 356.335.000,00 | 1.531.627.500,00 | | | | |
| | | Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelembagaannya | Jumlah Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelembagaannya | 100 Stel | 60.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelembagaannya | Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelembagaannya | 1 Paket | | 63.000.000,00 | | | 66.150.000,00 | 69.457.500,00 | 72.750.000,00 | 271.357.500,00 | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Kapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kelembagaan | 0 kali | 120.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | | 1.260.000.000,00 | 80 Orang | 1.260.000.000,00 | 132.300.000,00 | 138.915.000,00 | 145.915.000,00 | 543.130.000,00 | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 80.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | | 92.000.000,00 | 15 Orang | 92.000.000,00 | 105.800.000,00 | 121.670.000,00 | 137.670.000,00 | 457.140.000,00 | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 85% | 831.900.000,00 | 893.690.000,00 | 90% | 893.690.000,00 | 961.059.000,00 | 1.036.564.900,00 | 1.114.564.900,00 | 4.837.778.800,00 | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Periode Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 24.000.000,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | | 24.000.000,00 | 1 Paket | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 96.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Peralatan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Peralatan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | | 200.000.000,00 | 1 Paket | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 800.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak | Jumlah Barang Cetak | 3 Jenis | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | | Jumlah Penggandaan | 7.500 Lembar | | | | | | | | 7.500 Lembar | | | | |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3) | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) (4) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5) | KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18) | Lokasi (19) | | | | |
|---------------|----------------|---|--|---|------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | |
| | | | | | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | | | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengabdian | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang disediakan | 1 Paket | | 221.000.000,00 | 1 Paket | 24.000.000,00 | 28.000.000,00 | 1 Paket | 32.000.000,00 | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 18.000.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | | 20.000.000,00 | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 26.000.000,00 | 92.000.000,00 | | | | |
| | | Facilitasi Kunjungan Tamu | Periode Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Bulan | 12.000.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 14.000.000,00 | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 1 Laporan | 18.000.000,00 | 20.000.000,00 | 68.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Me Di Dalam dan Luar Daerah | 60 Kali | 437.500.000,00 | | | | | | | 437.500.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | | |
| | | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 481.690.000,00 | 1 Laporan | 529.859.000,00 | 1 Laporan | 582.844.900,00 | 637.844.900,00 | 2.232.238.800,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengabdian | Jumlah data arsip hasil penilaian yang dikumpulkan, ditelaah dan diklasifikasi | 1500 Dokumen Arsip | 120.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan dan Penggantian Meubel Kantor dan Meubel Ruang Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pelebaran Arsip Dinas pada SKPD | 1500 Dokumen | | 132.000.000,00 | 1500 Dokumen | 145.200.000,00 | 1500 Dokumen | 159.720.000,00 | 174.720.000,00 | 611.640.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pelayanan Fasilitas Pelaysan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitas Pelaysan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 720.000.000,00 | 981.000.000,00 | 95% | 467.550.000,00 | 100% | 254.677.500,00 | 267.677.500,00 | 2.690.985.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 0 unit | 500.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Unit | | 7.500.000.000,00 | 3 Unit | 225.000.000,00 | 0 Unit | - | - | 975.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | 0 set | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 0 Paket | | 105.000.000,00 | 1 Paket | 110.250.000,00 | 1 Paket | 115.762.500,00 | 121.762.500,00 | 452.775.000,00 | | Provinsi Jambi | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 Paket | 120.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | | Provinsi Jambi | | |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--------------|--|--------|
| | | | | | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) | Target (16) | Rp (17) | | |
| | | | | 0 Unit | | | 120.000.000,00 | 332.300.000,00 | 138.315.000,00 | 145.315.000,00 | 138.315.000,00 | 145.315.000,00 | 343.130.000,00 | 343.130.000,00 | 4 Unit | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 85% | 758.781.065,70 | 90% | 771.045.831,15 | 815.851.362,25 | 863.395.007,84 | 913.895.007,84 | 863.395.007,84 | 913.895.007,84 | 4.112.976.275,18 | 4.112.976.275,18 | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 Bulan | 3.882.120,00 | | | | | | | | | | 12 Bulan | 3.882.120,00 | Provinsi Jambi | |
| | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | 4.270.332,00 | 4.697.265,20 | 5.167.101,72 | 5.667.101,72 | 5.167.101,72 | 5.667.101,72 | 19.801.900,64 | 19.801.900,64 | 4 Laporan | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 12 Bulan | 499.714.855,50 | | | | | | | | 499.714.855,50 | 499.714.855,50 | 12 Bulan | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5.247.700.598,28 | 550.935.628,19 | 578.482.409,60 | 608.482.409,60 | 578.482.409,60 | 608.482.409,60 | 2.262.601.045,67 | 2.262.601.045,67 | 4 Laporan | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 12 Bulan | 255.184.094,20 | | | | | | | | 255.184.094,20 | 255.184.094,20 | 12 Bulan | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2.42.072.901,27 | 260.228.868,86 | 279.745.496,52 | 299.745.496,52 | 279.745.496,52 | 299.745.496,52 | 1.081.792.263,17 | 1.081.792.263,17 | 4 Laporan | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 85% | 1.029.084.473,68 | 90% | 1.639.538.697,37 | 562.815.632,24 | 580.356.413,85 | 600.456.413,85 | 580.356.413,85 | 600.456.413,85 | 19.368.851.630,99 | 19.368.851.630,99 | 100% | | Provinsi Jambi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 Unit | 256.200.000,00 | | | | | | | | 256.200.000,00 | 256.200.000,00 | 25 Unit | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 20 Unit | | 25 Unit | 2.69.010.000,00 | 282.460.500,00 | 296.683.525,00 | 311.483.525,00 | 296.683.525,00 | 311.483.525,00 | 1.159.637.550,00 | 1.159.637.550,00 | 25 Unit | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 5 Jenis | 52.884.473,68 | | | | | | | | 52.884.473,68 | 52.884.473,68 | 5 Jenis | | Provinsi Jambi | |
| | | | | 0 Unit | | 75 Unit | 55.578.697,37 | 58.305.132,24 | 61.202.388,85 | 64.202.388,85 | 61.202.388,85 | 64.202.388,85 | 239.274.607,31 | 239.274.607,31 | 300 Unit | | Provinsi Jambi | |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) | KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--|---|--|------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) | Target (16) | Rp (17) |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 Gedung | 1 Gedung | 700.000.000,00 | 1 Gedung | 16.250.000.000,00 | 1 Gedung | 200.000.000,00 | 1 Gedung | 200.000.000,00 | 1 Gedung | 200.000.000,00 | 1 Gedung | 700.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | | 1 Unit | 16.250.000.000,00 | 1 Unit | 200.000.000,00 | 1 Unit | 200.000.000,00 | 1 Unit | 200.000.000,00 | 1 Unit | 16.850.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | | 1 Unit | 21.000.000,00 | 1 Unit | 22.050.000,00 | 1 Unit | 23.152.500,00 | 1 Unit | 24.652.500,00 | 1 Unit | 90.855.000,00 |
| | | | Indeks Penerapan Sistem Wert ASN | 215 | 250 | 6.750.550.000,00 | 275 | 7.523.660.000,00 | 300 | 8.286.050.000,00 | 325 | 8.940.380.000,00 | 350 | 9.604.890.000,00 | 350 | 41.135.930.000,00 |
| | | | Indeks Profesionalitas ASN | 45 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 90 | |
| | | | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terdapat pada Kegiatan Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN | 90% | 90% | 1.485.000.000,00 | 90% | 1.770.000.000,00 | 90% | 2.205.000.000,00 | 90% | 2.640.000.000,00 | 90% | 3.075.000.000,00 | 90% | 11.175.000.000,00 |
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 700.000.000,00 | | | | | | | | | 1 Dokumen | 700.000.000,00 |
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah SK Penuhan yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan ASN | 280 Orang | 310 Orang | | | | | | | | | | 310 Orang | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah SK Penuhan yang tersesalkan | 400 SK | 400 SK | 60.000.000,00 | | | | | | | | | 400 SK | 60.000.000,00 |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 4 Dokumen | 340.000.000,00 |
| | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah PNS/ Anggota KORPRI yang difasilitasi | 0 Orang | 130 Orang | 450.000.000,00 | | | | | | | | | 130 Orang | 450.000.000,00 |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan (outcome) dan Kegiatan (Output) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|---|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------|---|--------------------|--|--------|----------------------------------|----|
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | (18) | |
| | | Facilitas Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di fasilitasi | 1 Lembaga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian | 100 Data Informasi | 275.000.000.00 | | | | | | | | | | 100 Data Informasi | 275.000.000.00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | | Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penebitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu ISIRI (KARS)/Kartu Suami (KARSU) | 350 kartu | | | | | | | | | | 100 Usulan Kartu | | | | | |
| | | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Laporan | | 300.000.000.00 | 1 Laporan | 325.000.000.00 | 350.000.000.00 | 375.000.000.00 | 1.350.000.000.00 | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1.350.000.000.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | 95% | 1.219.999.915.00 | 1.219.999.915.00 | 95% | 1.209.999.915.00 | 1.249.999.915.00 | 1.259.999.915.00 | 6.249.999.915.00 | 95% | | 95% | 6.249.999.915.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah SK Kenakan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi | 4.800 SK | 149.999.915.00 | | | | | | | | | 4.800 SK | 149.999.915.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | | Jumlah SK Mutasi | 250 SK | | | | | | | | | | 250 SK | | | | | |
| | | | Jumlah SK Jabatan Pelekasana | 5.500 SK | | | | | | | | | | 5.500 SK | | | | | |
| | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Revisi Mutasi, Pengajuan Jabatan Promosi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelekasana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | | 149.999.915.00 | 1 Dokumen | 149.999.915.00 | 149.999.915.00 | 149.999.915.00 | 599.999.660.00 | 1 Dokumen | | 4 Dokumen | 599.999.660.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengelolaan Kemalkan Pangkat ASN | Jumlah SK Kenakan Pangkat yang terselesaikan | 3.280 SK | 220.000.000.00 | | | | | | | | | 2.850 SK | 220.000.000.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | | Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja | 4 SK | | | | | | | | | | 3 SK | | | | | |
| | | Pengelolaan Kemalkan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenakan Pangkat ASN | 1 Laporan | | 230.000.000.00 | 1 Laporan | 240.000.000.00 | 250.000.000.00 | 250.000.000.00 | 980.000.000.00 | 1 Laporan | | 4 Laporan | 980.000.000.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terbi melalui seleksi terbuka/mutasi | 4 IPT Pratama | 850.000.000.00 | | | | | | | | | 20 IPT | 850.000.000.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | | Jumlah Pejabat Administrasi | 442 Pejabat Administrasi | | | | | | | | | | 300 Pejabat Administrasi | | | | | |
| | | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | | 950.000.000.00 | 1 Dokumen | 820.000.000.00 | 850.000.000.00 | 850.000.000.00 | 3.470.000.000.00 | 1 Dokumen | | 4 Dokumen | 3.470.000.000.00 | | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|--|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--|--|--------|
| | | | | | Target (G) | Rp (F) | Target (G) | Rp (E) | Target (G) | Rp (D) | Target (G) | Rp (C) | Target (G) | Rp (B) | Target (G) | Rp (A) | | |
| | | Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan dan Evaluasi Kompetensi ASN | 90% | 3.542.889.200,00 | 90% | 3.659.284.993,00 | 90% | 4.185.654.010,00 | 90% | 4.394.774.010,00 | 90% | 4.424.774.010,00 | 90% | 20.322.776.222,00 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah yang terfasilitasi dalam peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 589 Orang | 1.26.659.850,00 | 1.200 Orang | 1.26.659.850,00 | 1.250 Orang | 189.424.660,00 | 1.250 Orang | 189.424.660,00 | 1.250 Orang | 189.424.660,00 | 1.200 Orang | 1.26.659.850,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat dan sertifikasi ASN | Orang | 1.200 Orang | 1.200 Orang | 1.200 Orang | 1.250 Orang | 1.200.000.000,00 | 1.250 Orang | 1.200.000.000,00 | 1.250 Orang | 1.200.000.000,00 | 4.950 Orang | 694.933.830,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengembangan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat dan Sertifikasi ASN | 13 Orang | 1.000.000.000,00 | 50 Orang | 1.000.000.000,00 | 50 Orang | 1.000.000.000,00 | 50 Orang | 1.000.000.000,00 | 50 Orang | 1.000.000.000,00 | 50 Orang | 1.000.000.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengembangan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Pengabdian Masyarakat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | 1.075.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.075.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.200.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.200.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.200.000.000,00 | 4 Dokumen | 4.775.000.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat dan Sertifikasi ASN | 11 Orang | 1.600.629.350,00 | 30 Orang | 1.600.629.350,00 | 30 Orang | 1.600.629.350,00 | 30 Orang | 1.600.629.350,00 | 30 Orang | 1.600.629.350,00 | 30 Orang | 1.600.629.350,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah SK/Pelaksanaan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | 300 SK | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Pengembangan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dileble | 1 Dokumen | 1.800.625.143,00 | 1 Dokumen | 1.800.625.143,00 | 1 Dokumen | 1.850.629.350,00 | 1 Dokumen | 1.850.629.350,00 | 1 Dokumen | 1.850.629.350,00 | 4 Dokumen | 7.352.513.193,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Diklat Jabatan Fungsional | 0 Orang | 575.000.000,00 | 75 Orang | 575.000.000,00 | 75 Orang | 575.000.000,00 | 75 Orang | 575.000.000,00 | 75 Orang | 575.000.000,00 | 75 Orang | 575.000.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | 1 Dokumen | 600.000.000,00 | 1 Dokumen | 600.000.000,00 | 1 Dokumen | 700.000.000,00 | 4 Dokumen | 2.475.000.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Peningkatan SK Jabatan Fungsional | 679 SK | 240.000.000,00 | 250 SK | 240.000.000,00 | 250 SK | 240.000.000,00 | 250 SK | 240.000.000,00 | 250 SK | 240.000.000,00 | 250 SK | 240.000.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 2.888.000.000,00 | 1 Dokumen | 2.888.000.000,00 | 1 Dokumen | 345.600.000,00 | 1 Dokumen | 414.720.000,00 | 1 Dokumen | 434.720.000,00 | 4 Dokumen | 1.483.040.000,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 95% | 533.660.885,00 | 95% | 558.375.092,00 | 95% | 685.396.075,00 | 95% | 745.606.075,00 | 95% | 845.116.075,00 | 95% | 3.368.154.202,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |
| | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 ASN | 180.726.728,00 | 150 ASN | 180.726.728,00 | 150 ASN | 180.726.728,00 | 150 ASN | 180.726.728,00 | 150 ASN | 180.726.728,00 | 150 ASN | 180.726.728,00 | | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi | |

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026

| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (3) | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) (4) | Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020) (5) | KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18) | Lokasi (19) | | | |
|---------------|----------------|---|---|---|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | Target (6) | Rp (7) | Target (8) | Rp (9) | Target (10) | Rp (11) | Target (12) | Rp (13) | Target (14) | Rp (15) | Target (16) | Rp (17) | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | | | | | | | 12 Dokumen | | |
| | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.960.990.092,00 | 12 Dokumen | 255.111.075,00 | 12 Dokumen | 220.601.353,50 | 12 Dokumen | 265.116.075,00 | 12 Dokumen | 265.116.075,00 | 48 Dokumen | 9.86.518.595,50 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | Pengembangan Pembinaan Pelayaran Bin Cuci PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | Jumlah Penerimaan Pengabdian PNS Feldan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | 465 Orang | 450 Orang | 1.19.285.000,00 | | | | | | | | | 450 Orang | 1.19.285.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | Jumlah Penerimaan Pengabdian PNS Feldan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | 12 Orang | 12 Orang | | | | | | | | | | 12 Orang | | |
| | | | Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SINS | 950 Orang | 950 Orang | | | | | | | | | | 950 Orang | | |
| | | Pengembangan Pembinaan Peningkatan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | 950 Orang | 950 Orang | 1.402.285.000,00 | 950 Orang | 146.285.000,00 | 950 Orang | 180.004.721,50 | 950 Orang | 165.000.000,00 | 950 Orang | 165.000.000,00 | 3.800 Orang | 6.80.574.721,50 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin ASN | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.649.157,00 | | | | | | | | | 12 Laporan | 70.649.157,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 43 Orang | 43 Orang | 67.000.000,00 | 43 Orang | 75.000.000,00 | 43 Orang | 95.000.000,00 | 43 Orang | 120.000.000,00 | 43 Orang | 120.000.000,00 | 172 Orang | 357.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 12 Laporan | 20 Laporan | 153.000.000,00 | | | | | | | | | 20 Laporan | 153.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 12 Laporan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 210.000.000,00 | 22 Laporan | 250.000.000,00 | 22 Laporan | 295.000.000,00 | 22 Laporan | 295.000.000,00 | 86 Laporan | 910.000.000,00 | Provinsi Jambi dan Luar Provinsi |
| | | | | | | 27.927.715.543,38 | | 44.725.932.528,92 | | 29.901.016.321,69 | | 30.767.818.821,69 | | 131.812.250.388,48 | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja BKD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKD Provinsi Jambi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana kerja dan pendanaan BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada BAB III, Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BKD Provinsi Jambi 2021 – 2026.

4.2. Rencana Pendanaan BKD Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023 membutuhkan pendanaan sebesar Rp.44.725.932.528,38 (empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 37.725.932.528,38.
2. Program Kepegawaian Daerah, Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.7.523.660.000,-

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah sebanyak 11 Kegiatan serta 42 Sub Kegiatan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | BB Predikat | 2 Dokumen | 90 % | 25,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 25,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 250,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Fasilitas Pelayanan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | BB Predikat | 3 Laporan | 90 % | 35,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 35,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | BB Predikat | 90 Orang/Bulan | 90 % | 17,100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 17,250,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | BB Predikat | 12 Dokumen | 90 % | 250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 275,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 20,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 25,000,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Paket | 90 % | 63,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 66,150,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | BB Predikat | 100 Orang | 90 % | 126,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 132,300,000 |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | BB Predikat | 15 Orang | 90 % | 92,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB Predikat | 105,800,000 |

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 03 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 893,690,000 | | | | 961,059,000 | |
| 5 03 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Paket | 90 % | 24,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 24,000,000 |
| 5 03 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Paket | 90 % | 200,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 200,000,000 |
| 5 03 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Paket | 90 % | 22,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 24,000,000 |
| 5 03 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Dokumen | 90 % | 20,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 22,000,000 |
| 5 03 01 1.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 14,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 16,000,000 |
| 5 03 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 481,690,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 529,859,000 |
| 5 03 01 1.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | BB Predikat | 1500 Dokumen | 90 % | 132,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 145,200,000 |
| 5 03 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 981,000,000 | | | | 467,550,000 | |
| 5 03 01 1.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 3 Unit | 95 % | 750,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 225,000,000 |
| 5 03 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 1 Paket | 95 % | 105,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 110,250,000 |
| 5 03 01 1.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Persentase Fasilitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 1 Unit | 95 % | 126,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 132,300,000 |
| 5 03 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 771,043,831 | | | | 815,861,362 | |
| 5 03 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 4,270,332 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 4,697,365 |
| 5 03 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang | Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 524,700,598 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 550,935,628 |

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | disediakan | | | | | | | | | | | |
| 5 03 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Tenwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik | | BB Predikat | 1 Laporan | 90 % | 242,072,901 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 260,228,369 |
| 5 03 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 16,595,538,697 | | | | | 562,815,632 |
| 5 03 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 25 Unit | 90 % | 269,010,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 282,460,500 |
| 5 03 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 75 Unit | 90 % | 55,528,697 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 58,305,132 |
| 5 03 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 1 Unit | 90 % | 16,250,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 200,000,000 |
| 5 03 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Predikat AKIP Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Fasilitasi Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB Predikat | 35 Unit | 90 % | 21,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | 88 Predikat | 22,050,000 |
| 5 03 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | 7,523,660,000 | | | | | 8,286,050,000 |
| 5 03 02 1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | | | 1,770,000,000 | | | | | 2,205,000,000 |
| 5 03 02 1.01 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 900,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 1,200,000,000 |
| 5 03 02 1.01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 70,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 80,000,000 |
| 5 03 02 1.01 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Lembaga | 90 % | 500,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 600,000,000 |

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|--|
| | | | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 03 02 1.01 12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Laporan | 90 % | 300,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 325,000,000 |
| 5 03 02 1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | | | 1,329,999,915 | | | | | 1,209,999,915 |
| 5 03 02 1.02 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 95 % | 149,999,915 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 149,999,915 |
| 5 03 02 1.02 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Laporan | 95 % | 230,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 240,000,000 |
| 5 03 02 1.02 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 95 % | 950,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 820,000,000 |
| 5 03 02 1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | | | 3,865,284,993 | | | | | 4,185,654,010 |
| 5 03 02 1.03 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1200 Orang | 90 % | 126,659,850 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 189,424,660 |
| 5 03 02 1.03 03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 1,075,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 1,200,000,000 |
| 5 03 02 1.03 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 1,800,625,143 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 1,850,629,350 |
| 5 03 02 1.03 09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 575,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 600,000,000 |
| 5 03 02 1.03 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | | 275 Indeks 75 Indeks | 1 Dokumen | 90 % | 288,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 345,600,000 |
| 5 03 02 1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | 558,375,092 | | | | | 685,396,075 |

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|--|---|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 5 03 02 1.04 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 275 Indeks 75 Indeks | 12 Dokumen | 95 % | 196,090,092 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 255,111,075 |
| 5 03 02 1.04 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 275 Indeks 75 Indeks | 950 Orang | 95 % | 140,285,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 145,285,000 |
| 5 03 02 1.04 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 275 Indeks 75 Indeks | 43 Orang | 95 % | 67,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 75,000,000 |
| 5 03 02 1.04 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 275 Indeks 75 Indeks | 20 Laporan | 95 % | 155,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Indeks Profesionalitas ASN | 275 Indeks 75 Indeks | 210,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 44,725,932,528 | | | | | 29,257,585,994 |

BAB V

PENUTUP

Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatif. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BKD Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja BKD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja BKD ini berpedoman pada Renstra BKD 2021-2026, seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja BKD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2023.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BKD Provinsi Jambi Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2023 telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ini akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2023.

Jambi, 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



HENRIZAL, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710911 199803 1 004